



SEKOLAH RAKYAT SEBAGAI INSTRUMEN MEMUTUS MATA RANTAI KEMISKINAN

Timothy Joseph Shekinah Glory* & Sali Susiana**

Abstrak

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama gratis yang digagas Kementerian Sosial sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai kemiskinan, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan Ekstrem. Tulisan ini mengkaji peran Sekolah Rakyat sebagai instrumen untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan sosial di bidang pendidikan. Hasil studi terdahulu menunjukkan bahwa peningkatan akses dan tingkat pendidikan berkontribusi signifikan dalam memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi, memperbesar peluang suatu keluarga keluar dari kemiskinan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Komisi VIII DPR RI memiliki peran penting dalam mengawal keberhasilan program Sekolah Rakyat melalui fungsi legislasi untuk memperkuat dasar hukum, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan di lapangan agar tepat sasaran dan berkelanjutan, serta memastikan penganggaran yang responsif agar program ini berjalan optimal, terintegrasi lintas sektor, serta mampu memberikan dampak nyata dalam memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia.

Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin mencapai 8,57%, setara dengan 24,06 juta jiwa, dan sekitar 3,1 juta orang tergolong miskin ekstrem dengan pengeluaran harian di bawah Rp10.739 (BPS, 2025). Salah satu faktor utama yang memperparah kemiskinan adalah akses terhadap pendidikan yang tidak merata. Anak-anak dari keluarga miskin seringkali tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang layak, padahal pendidikan adalah kunci penting untuk meningkatkan taraf hidup dan membuka peluang ekonomi (Uzma, 2025).

Menjawab tantangan ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menginisiasi program Sekolah Rakyat, berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan Ekstrem. Program ini merupakan model sekolah

*) Analisis Legislatif Ahli Pertama Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: timothy.glory@dpr.go.id

**) Analisis Legislatif Ahli Utama Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: sali.susiana@dpr.go.id

berasrama gratis yang ditujukan bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Berdasarkan latar belakang tersebut, Tulisan ini mengkaji peran Sekolah Rakyat sebagai instrumen untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan sosial di bidang pendidikan

Sekolah Rakyat sebagai Bentuk Pemberdayaan Sosial melalui Pendidikan

Sekolah Rakyat merupakan lembaga pendidikan formal gratis yang diselenggarakan oleh Kemensos dan ditujukan bagi anak dari keluarga dalam kategori Desil 1 dan 2 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (Sinaga, 2025). Program ini bertujuan menyediakan pendidikan dasar hingga menengah yang tidak hanya menekankan pada pencapaian akademik, tetapi juga penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan hidup (Kemensos, 2025). Tujuan ini sejalan dengan pendekatan pembangunan sosial inklusif yang menempatkan pendidikan sebagai pilar utama dalam mempercepat mobilitas sosial dan memutus rantai kemiskinan (Setiawan, et al., 2024).

Pelaksanaan Sekolah Rakyat dirancang menyeluruh, mulai dari proses seleksi peserta, rekrutmen guru, penetapan lokasi, hingga penyusunan kurikulum. Proses seleksi peserta dilakukan melalui verifikasi status sosial ekonomi, dilanjutkan tes akademik sebagai bentuk penyaringan mutu. Guru yang akan mengajar direkrut berdasarkan kompetensi dan komitmen terhadap pemberdayaan sosial (Aranditio, 2025). Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyatakan bahwa lokasi Sekolah Rakyat tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatra, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, hingga Papua. Selain itu, dua perguruan tinggi, yaitu Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya telah menyatakan komitmen mereka dalam mendukung penyelenggaraan program ini (Kemensekneg, 2025).

Program ini akan dimulai pada Tahun Ajaran 2025/2026 dengan target pelaksanaan awal bulan Juli 2025 di daerah yang telah memenuhi syarat infrastruktur dan kesiapan teknis. Pendaftaran peserta dan guru dijadwalkan pada akhir Maret atau awal April 2025, menunggu persetujuan Presiden. Sekolah Rakyat dilaksanakan dengan sistem asrama, seluruh kebutuhan siswa—termasuk seragam, konsumsi, dan tempat tinggal—disediakan secara gratis oleh Kemensos.

Sekolah Rakyat menjadi bentuk nyata dari pelaksanaan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengintegrasikan fungsi perlindungan sosial dengan pemberdayaan melalui pendidikan. Pemberdayaan sosial melalui pendidikan ini adalah salah satu langkah yang harus dilakukan untuk mencapai manfaat sosial-ekonomi dari pendidikan gratis di masyarakat.

Pemerataan pendidikan memungkinkan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Hal ini penting karena pendidikan yang

merata dapat mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dan memberikan kesempatan bagi semua individu untuk mencapai potensi penuh mereka (Sasmiharti, 2023).

Apabila setiap individu dapat diberdayakan melalui pendidikan serta mampu mencapai potensi penuh mereka, maka akan terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia di suatu negara (Zahara et al., 2021). Tujuan inilah yang ingin dicapai melalui Sekolah Rakyat. Dalam jangka panjang, kualitas sumber daya manusia di Indonesia akan meningkat dan mampu diberdayakan sesuai keahlian masing-masing individu. Dengan upaya mendidik generasi muda untuk mengembangkan kompetensi akademis dan nonakademis, pendidikan yang berkualitas dapat menjadi investasi yang signifikan dalam pembangunan sosial-ekonomi suatu negara (Ding & You, 2022).

Instrumen Memutus Mata Rantai Kemiskinan

Kemiskinan adalah masalah sosial yang bersifat multidimensi, mencakup dimensi kesejahteraan manusia, konsumsi, pendidikan, kesehatan, dan akses infrastruktur dasar yang memadai sehingga akan terus menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun (Hermawan & Yulianti, 2021). Sebagai isu penting yang harus ditangani secara serius, banyak negara telah melakukan upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan, misalnya dengan memberikan subsidi dana pendidikan, beasiswa, dan penyediaan pendidikan gratis dari jenjang dasar hingga tinggi. Dalam konteks ini, Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi inovatif untuk mengatasi kesenjangan pendidikan dengan menyediakan pendidikan berbasis asrama gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia.

Pendidikan telah terbukti menjadi salah satu faktor kunci dalam upaya memutus mata rantai kemiskinan, terutama dalam konteks jangka panjang dan antargenerasi. Studi oleh Pohan dan Vitale (2016) menunjukkan bahwa pendidikan berperan penting mengatasi *poverty trap* melalui pendekatan intergenerasional di Indonesia. Penelitian yang menggunakan data dari Indonesian Family Life Survey ini membuktikan bahwa pendidikan mampu mengangkat keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan.

Analisis oleh Hermawan dan Yulianti (2021) terhadap data Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2020 juga menunjukkan bahwa semakin tinggi taraf pendidikan kepala keluarga, peluang keluarga untuk keluar dari kelompok miskin meningkat dengan signifikan. Selain itu, menurut Afrianto (2025) meningkatnya rata-rata taraf pendidikan di Indonesia pada periode 2015–2023 berdampak nyata terhadap penurunan tingkat kemiskinan nasional. Berbagai temuan tersebut memperkuat argumen bahwa pendidikan bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga merupakan alat pemberdayaan sosial yang sangat strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan.

Terdapat korelasi yang signifikan antara peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Data menunjukkan bahwa pada Maret 2024, persentase penduduk miskin sebesar 9,03%, menurun 0,33% poin dibandingkan Maret 2023, dan jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 0,68 juta orang dalam periode yang sama. Sementara itu, APS untuk kelompok usia 7–12 tahun telah mencapai 99,5% dan untuk usia 13–15 tahun mencapai 97,35% (BPS, 2024). Peningkatan partisipasi sekolah ini berkontribusi terhadap turunnya angka kemiskinan dengan meningkatkan keterampilan dan daya saing individu di pasar kerja. Melalui pemberdayaan sosial di bidang pendidikan, seluruh lapisan masyarakat Indonesia memiliki peluang yang setara untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan demikian, Sekolah Rakyat diyakini mampu menjadi instrumen untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Penutup

Sekolah Rakyat merupakan langkah konkret pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan sosial di bidang pendidikan. Sekolah Rakyat memberi peluang yang setara bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi akademik dan keterampilan hidup sekaligus membentuk karakter dan kepemimpinan. Berbagai data dan hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan akses pendidikan secara langsung berkorelasi dengan penurunan angka kemiskinan, baik secara individu maupun antargenerasi.

Pemerintah melalui Kemensos telah mengambil berbagai langkah untuk mendukung program ini, mulai dari penyediaan lokasi, rekrutmen tenaga pendidik, hingga mekanisme seleksi peserta didik. Komisi VIII DPR RI berperan penting dalam mengawal keberhasilan program ini melalui fungsi legislasi untuk memperkuat dasar hukum, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan di lapangan agar tepat sasaran dan berkelanjutan, serta memastikan penganggaran yang responsif agar program ini berjalan optimal, terintegrasi lintas sektor, serta mampu memberikan dampak nyata dalam memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia.

Referensi

- Afrianto, Y. (2025). Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 2015-2023. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 4(1), 82-88.
- Aranditio, S. (2025, April 9). Rekrutmen Guru Khusus untuk Sekolah Rakyat Segera Dibuka. *Kompas.com*. <https://www.kompas.id/artikel/rekrutmen-guru-khusus-untuk-sekolah-rakyat-segera-dibuka>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Provinsi dan Kelompok Umur, 2024*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjlxMSMy/angka-partisipasi-sekolah-aps-menurut-provinsi-dan-kelompok-umur.html>

- Badan Pusat Statistik. (2025). *Persentase Penduduk Miskin September 2024 turun menjadi 8,57 persen*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html>
- Ding, R., & You, Z. (2022). Education Partnership Assistance to Promote the Balanced and Sustainable Development of Higher Education: Lessons from China. *Sustainability*, 14(14), 8366.
- Hermawan, W., & Yulianti, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Peluang Keluarga Keluar Dari Kelompok Keluarga Miskin. *Jurnal Ekonomi-QU*, 11(2), 237-246.
- Kementerian Sekretariat Negara RI. (2025, April 14). *Pemerintah targetkan 53 Sekolah Rakyat tuntas Juni 2025*. https://setneg.go.id/baca/index/pemerintah_targetkan_53_sekolah_rakyat_tuntas_juni_2025
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2025, Maret 11). *Kemensos matangkan konsep Sekolah Rakyat, siap diluncurkan Juli 2025*. <https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial/Kemensos-Matangkan-Konsep-Sekolah-Rakyat,-Siap-Diluncurkan-Juli-2025>
- Pohan, H. L. M., & Vitale, J. D. (2016). Overcoming the Poverty Trap through Education: An Intergenerational Study on Indonesia. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 6(1), 1-21.
- Sasmiharti, J. (2023). Manfaat Sosial Ekonomi dari Pendidikan Gratis di Masyarakat. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 6(1), 57-62.
- Setiawan, A. B., Prasetyo, F. H., Yusuf, M., Prajanti, S. D. W., Prasetyo, A., & Fafurida, F. (2024). Pembangunan Inklusif dan Industrialisasi di Indonesia: Dampaknya terhadap Kesejahteraan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 24(2), 153-166. <https://doi.org/10.21002/jepi.2024.10>
- Sinaga, N. (2025, April 12). Sekolah Rakyat Berasrama Gratis Akan Dibuka, seperti Apa Konsep Pendidikannya?. Kompas.com. <https://www.kompas.id/artikel/sekolah-rakyat-berasrama-gratis-akan-dibuka-seperti-apa-konsep-pendidikannya>
- Uzma, H. N. (2025, April 9). Inpres Sekolah Rakyat Jadi Instrumen Penting Tekan Kemiskinan Ekstrem. *News.detik.com*. <https://news.detik.com/berita/d-7861330/inpres-sekolah-rakyat-jadi-instrumen-penting-tekan-kemiskinan-ekstrem>
- Zahara, L., Syahidi, K., Fartina, F., Novianti, B. A., & Suriani, S. (2021). Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together dan Think Pair Share ditinjau dari Motivasi. *Kappa Journal*, 5(1), 142–148.

